

## Pengaruh Indikator *Ease of Doing Business* terhadap Minat Investasi: Bukti Empiris di Provinsi DKI Jakarta

### *The Effect of Ease of Doing Business Indicators on Investment Interest: Empirical Evidence in DKI Jakarta Province*

Aleknaek Martua<sup>1\*</sup>, Sayuti<sup>2</sup>, Mulyana<sup>3</sup>, Irka Tia Ginting<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Jatinangor-Sumedang, Jawa Barat, 45363

\* aleknaek@ipdn.ac.id

#### ABSTRAK

Pembangunan suatu wilayah pada hakikatnya tidak terlepas dari investasi. Investasi pada umumnya dapat membantu suatu wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang diperlukan dalam mengolah potensi ekonomi di wilayah tersebut. Hingga 2021, capaian dari indikator EoDB perlu ditingkatkan dalam mendukung iklim investasi. Hingga saat ini EoDB masih dianggap sebagai rujukan yang berharga bagi negara-negara yang ingin mengukur tingkat risiko dan biaya dalam melakukan bisnis. Provinsi DKI Jakarta pada kondisi saat ini berupaya dalam meningkatkan investasinya di tengah isu pemindahan ibu kota negara. Penelitian ini berfokus untuk melihat keterkaitan antara EoDB terhadap minat investasi di samping faktor ekonomi lainnya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan PLS-SEM pada sampel penelitian sebanyak 150 pengusaha dengan kategori usaha menengah dan besar. Penelitian ini membuktikan secara empiris, Indikator Kemudahan Melakukan Usaha di Provinsi DKI Jakarta memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat investasi di Provinsi DKI Jakarta selain Faktor Ekonomi yang digunakan dalam model persamaan simultan. Pada variabel Kemudahan Melakukan Usaha (X1), seluruh indikator secara signifikan dapat menjelaskan Indikator Kemudahan Melakukan usaha. Peningkatan satu satuan indikator kemudahan melakukan usaha akan berpotensi meningkatkan minat investasi sebesar 74,6% di Provinsi DKI Jakarta, ceteris paribus. Lima indikator yang menjelaskan Variabel Kemudahan Melakukan Usaha terbesar dan koefisiennya diantaranya adalah Getting Electricity (0.806), Trading Across Border (0.761), Protecting Minority Investor (0.743), Getting Credit (0.728), dan Registering Property (0.724).

**Kata kunci:** *Ease of Doing Business, Investasi, PLS-SEM, Provinsi DKI Jakarta*

#### ABSTRACT

The development of a region is essentially inseparable from investment. Investment in general can help a region to encourage the economic growth needed to process the economic potential in the region. Until 2021, EoDB indicators need to be improved in supporting the investment climate. Until now, the EoDB is still considered a valuable reference for countries that want to measure the level of risk and cost of doing business. Provinsi DKI Jakarta in its current condition seeks to increase its investment amid the issue of moving the national capital. This research focuses on looking at the relationship between EoDB and investment interest in addition to other economic factors. The analysis method used in this study is to use PLS-SEM on a research sample of 150 entrepreneurs with medium and large business categories. This study proves empirically that the Ease of Doing Business Indicator in Provinsi DKI Jakarta has a significant influence on investment interest in Provinsi DKI Jakarta in addition to the Economic Factors used in the simultaneous equation model. In the Ease of Doing Business variable (X1), all indicators can significantly explain the Ease of Doing Business Indicator. A one unit increase in the ease of doing business indicator will potentially increase investment interest by 74.6% in Provinsi DKI Jakarta, ceteris paribus. The five indicators that explain the Ease of Doing Business Variable the most and their coefficients include Getting Electricity (0.806), Trading Across Border (0.761), Protecting Minority Investors (0.743), Getting Credit (0.728), and Registering Property (0.724).

**Keywords:** *Ease of Doing Business, Investment, PLS-SEM, Provinsi DKI Jakarta*

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi melalui investasi menjadi salah satu indikator penting yang dapat digunakan untuk menilai keadaan suatu perekonomian di dalam suatu wilayah dan menjadi suatu tolok ukur dalam menilai keberhasilan suatu pembangunan di dalam suatu wilayah. Setiap wilayah tentunya akan selalu berusaha untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya melalui investasi dan akan menentukan target pertumbuhan ekonominya demi keberhasilan perekonomian suatu wilayah dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh investasi melalui perputaran barang dan jasa di wilayah tertentu akan mempengaruhi skala ekonomi sehingga dapat memberikan tambahan pendapatan dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Investasi selayaknya harus dirancang dengan kompleks agar dapat mengarahkan investasi tersebut pada sektor ekonomi yang produktif, khususnya pada negara yang sedang berkembang (Gumala & Anis, 2019). Investasi pada umumnya dapat membantu suatu wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang diperlukan dalam mengolah potensi ekonomi di wilayah tersebut (Raghdhsifa et al., 2018). Secara makro dalam konteks negara berkembang, investasi masih memiliki proporsi yang relatif kecil dibandingkan dengan konsumsi dan belanja pemerintah dalam memberikan kontribusi ekonomi suatu negara. Oleh karena itu selama melalui mekanisme yang tepat guna, pertumbuhan ekonomi melalui investasi masih dianggap penting untuk mendorong perekonomian di dalam suatu wilayah. Investor dalam membuat keputusan investasi memiliki preferensi yang berbeda-beda namun memiliki prioritas terhadap komponen variabel apa saja yang perlu untuk diperhatikan sebelum memulai investasi. Hal tersebut karena banyaknya risiko yang harus dipikirkan dengan matang oleh seorang investor dalam belanja barang modal atau membangun industri di dalam suatu wilayah ketika akan berinvestasi.

Investasi memiliki peran yang cukup vital dan positif sehingga dengan adanya investasi di sektor tertentu, maka potensi penyerapan tenaga kerja secara langsung akan memberikan dampak yang positif. Hal lain

yang akan terdampak adalah sektor hulu yang menjadi input dan sektor hilir sebagai pengguna dari sektor investasi yang bertambah. Investasi yang baru di dalam suatu wilayah akan berpotensi menambah investasi kembali di kemudian hari dengan jalan mengakumulasi modal jika output dari sektor tertentu terus menerus diserap oleh perekonomian di wilayah tersebut. Dalam hal ini investasi masih dikatakan sangat diperlukan bagi daerah yang ingin terus mengembangkan skala ekonomi di wilayahnya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Sehingga saat ini investasi adalah salah satu indikator dalam perekonomian yang selalu dan akan mendapatkan perhatian yang khusus oleh pemerintah hingga saat ini khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Pada saat ini, Provinsi DKI Jakarta masih menjadi episentrum untuk dunia industri dan manufaktur secara nasional (Martua, 2022).

Hingga 2021, *EoDB (Ease of Doing Business)* merupakan indikator yang perlu ditingkatkan dalam mendukung iklim investasi. Menurut *CIPS (Center for Indonesian Policy Studies)*, *EoDB* dapat mendorong pertumbuhan kemitraan dari pemerintah dan swasta dalam mendukung pengembangan sektor-sektor potensial di suatu wilayah. Contohnya dalam hal mendukung ketahanan pangan, skema kemitraan pemerintah dan swasta pada sektor infrastruktur logistik utama dapat menjadikan salah satu cara untuk mengurangi biaya logistik, kehilangan makanan, dan insiden limbah makanan. Peraturan pemerintah dalam mendukung *EoDB* di Indonesia harus sederhana, efektif, efisien, dan aplikatif di semua daerah. Karena kompleksitas birokrasi perizinan, biasanya perusahaan lebih untuk memilih tinggal di lingkungan yang bersifat informal, meskipun itu menanggung sejumlah biaya peluang dalam hal bidang perlindungan keamanan, akses kredit bank, dan biaya lainnya. Seluk-beluk perizinan secara bertahap dapat mengurangi minat untuk mendaftarkan bisnis informal khususnya *entrepreneur* sebagai bisnis formal, dan dengan itu, minat investor untuk membuka bisnis di Indonesia telah melambat.

Peringkat Indonesia pada Indeks *EoDB* pada tahun 2020 tetap tidak berubah dibandingkan dengan tahun 2019 di angka 73. Dalam *EoDB Index 2020*, Indonesia

menduduki peringkat ke-140 pada indikator *Starting a Business*. Dengan meningkatkan indeks *Starting a Business* diantaranya, dapat memberikan dampak peningkatan entrepreneur di wilayah tersebut sehingga memberikan dampak kesejahteraan dan angka penyerapan tenaga kerja yang tinggi pula. Untuk mengatasi masalah penyerapan tenaga kerja, pemerintah ingin menciptakan lapangan kerja dengan menarik lebih banyak investasi di dalam dan ke dalam negeri. Seiring berjalannya waktu hingga 2021, dalam menunjang untuk peningkatan investasi yang dapat berkontribusi terhadap indeks pertumbuhan ekonomi, Provinsi DKI Jakarta yang dimana merupakan lokus utama survey EoDB di Indonesia menjadi penentu penilaian dalam hal kemudahan berusaha. Perizinan dan non perizinan yang hingga saat ini merupakan instrument pemerintah dalam pengaturan merupakan salah satu indikator penting dalam penentuan kemudahan berusaha di Indonesia dan akan selalu menjadi salah satu hal yang perlu dibenahi.

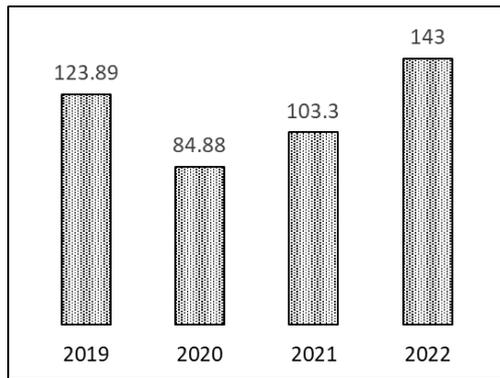
Indeks EODB menilai seberapa mudah atau sulit bagi para pengusaha dan bisnis untuk memulai, mengoperasikan, dan mengembangkan aktivitas mereka. Indeks EODB saat ini disusun dan diterbitkan oleh Bank Dunia. Indeks EODB memperhitungkan berbagai faktor, termasuk efisiensi peraturan bisnis, kemudahan memperoleh izin dan lisensi, perlindungan hak milik, akses terhadap kredit, peraturan perpajakan, penegakan kontrak, dan lingkungan bisnis secara keseluruhan. Indeks ini bertujuan untuk memberikan penilaian obyektif mengenai kemudahan aktivitas bisnis yang dapat dilakukan di berbagai negara, sehingga mendorong investasi, kewirausahaan, dan pertumbuhan ekonomi.

Negara-negara dengan peringkat EODB yang lebih tinggi umumnya dianggap memiliki iklim bisnis yang lebih baik, karena mereka memiliki prosedur yang efisien, peraturan yang transparan, dan kerangka hukum yang kuat yang memfasilitasi operasi bisnis. Pemerintah sering berusaha untuk meningkatkan peringkat EODB mereka dengan menerapkan reformasi dan kebijakan yang memudahkan bisnis untuk beroperasi dan menarik investasi. Perkembangan ekonomi suatu negara tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam yang melimpah atau kekuatan industri yang kuat, tetapi juga oleh

kemampuan negara tersebut untuk menciptakan lingkungan bisnis yang ramah dan menguntungkan. Dalam konteks ini, EODB muncul sebagai indikator yang penting. EODB mencerminkan sejauh mana negara memberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan bisnis, mulai dari proses pendirian perusahaan hingga penyelesaian kontrak. Negara-negara dengan peringkat EODB yang tinggi biasanya menarik minat investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di beberapa negara, keberadaan investasi menjadi pendorong dari pertumbuhan ekonomi (Wijaya, 2018). Indikator dan metodologi pada EoDB dirancang untuk membantu meningkatkan iklim bisnis secara keseluruhan, dan memeringkat negara-negara berdasarkan seberapa ramah mereka terhadap bisnis di wilayahnya. Laporan dari indikator EoDB penting bagi perusahaan dan investor di seluruh dunia, karena membantu mereka memutuskan di mana menginvestasikan uang mereka serta tempat membuka pabrik atau menjual produk. Pada saat ini banyak negara-negara berkembang yang ingin menarik lebih banyak investasi telah berusaha untuk meningkatkan peringkat mereka dalam laporan EoDB di akhir 2021. Beberapa negara berusaha untuk menjaga indeks EoDB dan melakukan perubahan dengan menciptakan perubahan kebijakan yang substansial, termasuk dengan mempermudah bisnis untuk membayar pajak, mendapatkan pinjaman, atau menegakkan kontrak. Di Indonesia sendiri, EoDB merupakan salah satu faktor utama yang menjadi pendorong dalam pembuatan Omnibus Law Cipta Kerja saat ini.

Provinsi DKI Jakarta pada kondisi saat ini berupaya dalam meningkatkan investasinya di tengah isu pemindahan ibu kota negara. Dengan berpindahnya ibu kota baru dari Jakarta, maka berpotensi banyak pelaku ekonomi khususnya dari sektor pemerintah akan berpindah ke ibu kota baru. Hal tersebut akan berpotensi menimbulkan terjadinya degradasi skala kegiatan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta. Berikut ini ditampilkan realisasi investasi Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2019-2022.



Gambar 1. Trend Realisasi Investasi di Provinsi DKI Jakarta 2019-2022 (dalam Triliun Rupiah)  
Sumber: nswi.bkpm.go.id (diolah)

Dari gambar di atas masih dapat terlihat bahwa realisasi investasi masih bertumbuh melewati angka realisasi investasi di tahun 2019 sebelum masa Covid-19. Realisasi investasi pada tahun 2022 menjadi puncak realisasi investasi dalam empat tahun terakhir. Dengan kondisi faktual yang ada saat ini, maka perlu untuk Provinsi DKI Jakarta dapat menjaga iklim investasi di wilayahnya. Iklim investasi di Provinsi DKI Jakarta perlu dijaga untuk tetap memberikan optimisme kepada investor dapat dengan aman dan merasa nyaman dapat mengakumulasi modalnya. Seiring dengan indeks EoDB yang dinyatakan masih berguna indikatornya untuk dilakukan penelitian secara substansial, namun pada kondisi saat ini indeks EoDB masih belum dirilis. Dengan landasan tersebut, maka dalam penelitian ini akan dicoba untuk melakukan keterkaitan antara indikator EoDB terhadap potensi minat investasi dari masing-masing investor di Provinsi DKI Jakarta. Pengujian mengenai kausalitas indeks EoDB terhadap minat investasi di Provinsi DKI Jakarta perlu untuk dilakukan guna bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Jika pada penelitian ini dapat dibuktikan bahwa variabel EoDB memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat investasi di Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya perlu untuk dianalisis mengenai indikator apa saja yang menjadi perhatian investor dalam melakukan investasi di Provinsi DKI Jakarta. Indikator merupakan pengukuran yang dilakukan terhadap variabel yang tidak dapat diukur secara langsung (variabel laten). Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini fokus untuk melihat kausalitas EoDB terhadap minat investasi di

Provinsi DKI Jakarta di samping faktor ekonomi lainnya. Penelitian ini menarik karena mengukur bagaimana pengaruh EoDB pasca terbitnya OSS dengan sampel penelitian Provinsi DKI Jakarta.

Penelitian ini dilakukan guna rekomendasi untuk dilakukannya kajian indikator penting dalam meningkatkan investasi khususnya dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap indikator tersebut dan dapat dilakukan perbaikan berkelanjutan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan iklim investasi di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu penelitian ini menjawab mengenai update terkini peran dari masing-masing indikator dalam variabel EoDB dapat memberikan keputusan minat investasi investor di mana saat ini kajian mengenai EoDB belum rilis hingga saat ini. Kajian ini merupakan pembaharuan mengenai metode kausalitas dengan teknik simultan untuk mengetahui preferensi investor dalam menentukan minat investasi di Provinsi DKI Jakarta. Kajian ini penting diteliti di lokasi Provinsi DKI Jakarta mengingat dalam waktu dekat akan menjadi kota pusat ekonomi pasca pemindahan Ibukota Indonesia ke Nusantara.

## METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer yang diambil dengan metode penyebaran kuesioner kepada pelaku usaha eksisting/ calon pelaku usaha dengan skala usaha menengah dan besar. Skala usaha menengah dan besar menurut Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, terletak pada kriteria besaran modal usaha yang perlu dimiliki oleh pelaku usaha menengah adalah minimal 5 (lima) milyar rupiah. Sehingga dalam penelitian ini dilakukan kepada pengusaha yang memiliki modal usaha di atas 5 (lima) milyar rupiah.

Analisis yang dilakukan adalah dengan menggunakan analisis kuantitatif. Metode analisis yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan analisis faktor konfirmatori yaitu *Partial Least Squares – Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). PLS-SEM digunakan untuk menghubungkan keterkaitan variabel

latent yang tidak dapat diukur langsung antara variabel bebas dan variabel tidak bebas. Masing-masing variabel latent dijelaskan berdasarkan indikator-indikatornya. Dalam penelitian ini ada dua variabel laten (bebas) yang digunakan untuk dilihat hubungannya terhadap variabel latent (tidak bebas). Variabel bebas dalam penelitian yang digunakan adalah EoDB dan Faktor Ekonomi serta variabel tak bebas yang digunakan adalah minat investasi. Prosedur pelaksanaan analisis menggunakan SEM-PLS dilakukan dengan empat tahapan. Pertama, melakukan pengukuran instrument survey dari masing-masing indikator dan menyebarkan kuesioner, serta melakukan input data. Kedua, melakukan uji measurement model dengan menguji validitas dan reliabilitas konstruk dari masing-masing indikator. Ketiga, melakukan uji structural model yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antar variabel/ korelasi antara konstruk yang diuji dengan statistik-t. Keempat, melakukan interpretasi hasil dari statistik yang telah diukur dari masing-masing konstruk.

PLS-SEM merupakan suatu model statistik persamaan struktural SEM yang berbasis pada komponen atau varian. PLS-SEM yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan secara alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM yang berbasis pada kovarian menjadi berbasis varian. Keunggulan metode PLS-SEM diantaranya adalah dapat digunakan untuk sampel yang relatif kecil dan bebas dari asumsi. Metode pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner online dilakukan dengan menyebarkan melalui alamat email para investor eksisting dan potensial. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 150 perusahaan eksisting dan potensial. Software yang digunakan dalam analisis data adalah menggunakan Smart PLS dikarenakan penggunaannya yang mudah dan dapat menampilkan output ke dalam excel. Hal tersebut yang menjadi keunggulan Smart PLS dibandingkan dengan Wrap PLS.

#### **A. Ease of Doing Business (EoDB)**

Pada dasarnya, *Ease of Doing Business* secara signifikan telah berbicara mengenai peran pemerintahan baik itu secara institusi maupun proses (Ikeanyibe et al., 2021). Dalam menghadapi suatu perubahan perekonomian secara global dan juga peran keikutsertaan

Indonesia di dalam berbagai hal kerja sama internasional perlu untuk diciptakan suatu iklim penanaman modal yang dapat dikatakan kondusif, ramah investasi, kepastian hukum yang jelas dan konsisten, keadilan dalam regulasi, serta efisien pelaksanaannya di samping memperhatikan sejumlah kepentingan ekonomi yang bersifat nasional (Sinaga, 2017). EoDB merupakan sebuah indeks yang dirancang dan dibuat oleh World Bank. Di dalam Indeks tersebut ditunjukkan semakin tinggi skor peringkat dari suatu negara dapat merepresentasikan bahwa negara tersebut telah memiliki tingkat kemudahan berbisnis yang semakin baik. Dalam hal ini dua dimensi tersebut memiliki korelasi yang positif.

Sejumlah negara dengan tingkat kemudahan berusaha yang baik tentu dapat dikatakan lebih bersahabat dengan pelaku bisnis. Dengan adanya indeks kemudahan dalam melakukan usaha, diharapkan dapat mempermudah investor dalam melakukan penanaman modal, khususnya dalam pengadaan fixed asset. Sehingga secara langsung dan tak langsung hal tersebut berdampak pada semakin besar juga kesempatan negara tersebut untuk dapat mengembangkan sektor-sektor yang potensial seperti sektor kunci termasuk pariwisata dan lainnya.

Di dalam pelaksanaan pengukuran pada indikator EoDB, ada sejumlah sepuluh indikator yang telah digunakan dalam mengukur indeks kemudahan melakukan usaha di dalam suatu negara. Pertama adalah *starting a business* yang diukur dengan menghitung jumlah kebutuhan modal minimum bayar, banyaknya prosedur perizinan, waktu dan biaya untuk sebuah perusahaan terbatas yang berukuran kecil sampai menengah untuk dapat memulai dan melakukan operasional secara formal. Dalam hal ini salah satunya subjek yang memiliki peran adalah notaris khususnya dalam kegiatan membuat legalitas akta perusahaan (Alwajdi, 2020). Cakupan kegiatan dalam pelaksanaan suatu reformasi perizinan berusaha berada pada saat memulai usaha dengan adanya persyaratan dasar dan perizinan berusaha berbasis risiko pada akun OSS. Pada kondisi saat pelaksanaan usaha, dari pemerintah daerah tetap ada monitoring dalam pelaksanaan kegiatan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan pelaksanaan

pengawasan dan pengendalian (Wijaya, 2018).

Kedua, *dealing construction permit* yang merupakan indikator dalam mengevaluasi prosedur, waktu dan biaya perizinan dalam konstruksi bangunan gudang, termasuk dalam mendapatkan izin dan non-izin lainnya yang diperlukan, mengirim semua prosedur yang diminta, meminta dan menerima semua inspeksi dalam pelaksanaan teknis lapangan untuk monitoring dan evaluasi yang diperlukan untuk mendapatkan informasi keseluruhan keteknisan.

Ketiga, *getting electricity* merupakan suatu indikator yang digunakan dalam mengukur sejumlah prosedur, lamanya waktu, dan besaran biaya yang diperlukan agar sebuah bisnis mendapatkan konektivitas listrik secara permanen.

Keempat, *registering property* yang merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur sejumlah tahapan, lamanya waktu, dan besaran biaya yang diperlukan untuk mendaftarkan suatu property di dalam suatu daerah.

Kelima, *getting credit* merupakan sebuah indikator yang digunakan dalam mengukur kekuatan sistem laporan kegiatan kredit dan efektivitas dari undang-undang jaminan dana dan juga kebangkrutan dalam memfasilitasi sejumlah pinjaman.

Keenam, *protecting minority investors* yang merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kekuatan perlindungan terhadap saham minoritas jika ada penyalahgunaan aset perusahaan.

Ketujuh, *paying taxes* yang merupakan indikator yang digunakan untuk mencatat sejumlah pajak dan kontribusi yang wajib dibayar oleh sebuah perusahaan terdaftar dan juga untuk mengukur beban administratif dalam membayar pajak.

Kedelapan *trading across border* yang merupakan sebuah indikator yang diukur berdasarkan perpaduan variabel berapa lama waktu dan besaran biaya terkait dengan proses operasional logistik untuk kegiatan mengekspor dan mengimpor barang. Kedua variabel tersebut

Kesembilan *enforcing contracts* yang merupakan sebuah indikator untuk mengukur lamanya waktu dan besaran biaya untuk menyelesaikan konflik/ perselisihan komersial yang telah terjadi beserta dinamikanya.

Kesepuluh *resolving insolvency* yang merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu, besaran biaya, dan hasil dari proses insolvensi dengan melibatkan badan hukum domestik. Sepuluh indikator tersebut menurut *World Bank* dapat merepresentasikan indeks kemudahan berusaha di setiap negara. Kendala investasi yang menjadi perhatian saat ini adalah faktor regulasi dan birokrasi (Christmawan & Utami, 2022). Hal tersebut tertuang dalam indikator kemudahan melakukan usaha di Provinsi DKI Jakarta. EoDB secara nyata berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan dapat menciptakan iklim wirausaha yang lebih baik (Nageri, 2020). Selain itu investasi dan EoDB merupakan dua kesatuan yang saling melengkapi dan saling memberikan pengaruh yang outputnya dapat meningkatkan perekonomian di dalam suatu daerah (Femina et al., 2022).

Teori yang mendasari dalam penelitian ini adalah paradigma OLI (Kepemilikan, Lokasi, dan Internalisasi) atau yang disebut Eclectic paradigm theory dalam ekonomi. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan dari suatu negara dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan dari negara lain dalam memasok pasar atau sekumpulan pasar tertentu (Abille & Mumuni, 2023). Keunggulan ini dapat muncul baik dari kepemilikan privat perusahaan atau akses terhadap seperangkat aset penghasil pendapatan, atau dari kemampuan mereka untuk mengkoordinasikan aset-aset tersebut dengan aset-aset lain melintasi batas-batas negara dengan cara yang menguntungkan mereka relatif terhadap pesaing mereka atau pesaing potensial. Hal lainnya adalah sejauh mana perusahaan menganggap bahwa keputusan terbaik mereka untuk menginternalisasi pasar dalam menghasilkan dan/atau menggunakan aset-aset produksi dan dengan demikian menambah nilai bagi perusahaan mereka, serta sejauh mana perusahaan memilih untuk menempatkan kegiatan penambahan nilai ini di luar batas-batas nasional mereka. Dalam hal ini perusahaan menentukan preferensi terbaik untuk mereka dapat menanamkan modal di dalam suatu negara untuk mencapai tujuan perusahaan mereka.

## B. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dalam penelitian ini mengambil beberapa aspek yang berkaitan dengan input produksi suatu perusahaan ketika akan berinvestasi. Input merupakan seluruh barang maupun jasa (termasuk teknologi) yang secara langsung mempengaruhi faktor produksi suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, faktor ekonomi yang digunakan diantaranya adalah jumlah penduduk, usia angkatan kerja, upah nominal, kemajuan teknologi, ketersediaan sumber daya alam, dan ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Enam variabel yang merepresentasikan faktor ekonomi tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan skala ekonomi suatu perusahaan.

Jumlah penduduk dengan usia angkatan kerja yang semakin tinggi di dalam suatu wilayah akan mendorong meningkatnya demand pekerjaan sehingga akan membuat besaran gaji lebih kompetitif. Populasi memberikan pengaruh yang positif untuk minat investasi dikarenakan dengan tersedianya input produksi yang melimpah, hal tersebut akan memberikan persaingan harga yang kompetitif bagi investor (Haliti et al., 2019). Upah nominal yang dibatasi pemerintah memberikan pengaruh kepada iklim investasi dikarenakan akan memberikan pengaruh kepada biaya produksi secara langsung, khususnya industri dengan padat karya yang membutuhkan tenaga kerja yang cukup besar. Selain itu kemajuan teknologi di dalam suatu daerah turut membuat efisien faktor produksi dan membuat investor tertarik untuk mengakumulasi modal untuk faktor produksi. Teknologi yang maju tentunya dapat mendorong dalam efisiensi biaya produksi suatu barang atau jasa. Pengukuran teknologi dalam penelitian ini dengan cara mengukur bagaimana teknologi dapat diterapkan di Provinsi DKI Jakarta tanpa ada hambatan dalam penerapannya. Selain itu ketersediaan sumber daya alam turut memberikan pengaruh preferensi positif bagi

investor dikarenakan dengan tersedianya sumber daya alam, maka sumber input produksi akan lebih pasti untuk didapatkan dan tidak ada permasalahan akan faktor input dalam pelaksanaan produksi barang. Terakhir adalah sumber daya manusia dengan kesesuaian pendidikan yang dibutuhkan memberikan ketertarikan untuk investor dikarenakan akan memudahkan investor mendapatkan tenaga kerja untuk melakukan produksi. Pertumbuhan penduduk seyogyanya berdampak pada pertumbuhan kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, pakaian, dan seluruh kebutuhan hidup manusia termasuk kebutuhan akan pekerjaan. Sehingga diperlukan dalam hal ini investasi untuk menopang semua kebutuhan tersebut (Wijaya, 2018).

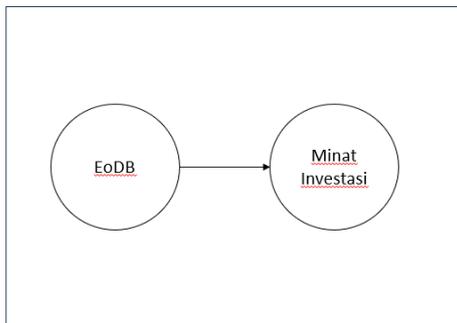
## C. Minat Investasi

Investasi didefinisikan sebagai penanaman modal dalam ekuitas dengan batas minimal 10% yang disertai dengan tujuan untuk kepemilikan dan kepentingan manajerial yang bertahan lama (Hasan et al., 2018). Investasi dapat diartikan juga sebagai sejumlah penanaman modal dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di dalam suatu negara (Herlith, 2016). Minat investasi dalam penelitian ini merupakan suatu persepsi yang diberikan oleh investor dalam berinvestasi. Dalam mengukur minat investasi sebagai variabel laten, indikator variabel yang digunakan ada dua diantaranya adalah keinginan perusahaan untuk berinvestasi lebih banyak di Provinsi DKI Jakarta saat ini dan keinginan melanjutkan investasi dan terus mengakumulasi modal dalam jangka yang cukup lama. Dua indikator tersebut diharapkan dapat menjelaskan definisi dari investasi untuk kepentingan kepemilikan modal dalam jangka waktu yang cukup lama (Wang et al., 2020). Jangka waktu yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebesar 35 tahun sesuai dengan Hak Guna Usaha yang tertera pada Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## D. Keterkaitan EoDB pada Minat Investasi

Dalam beberapa studi yang dilakukan, EoDB memiliki keterkaitan yang positif terhadap FDI di dalam suatu negara. Semakin

meningkatnya ranking EoDB indeks di dalam suatu negara, maka kemungkinan besar realisasi investasi yang ditimbulkan akan semakin besar (Martua, 2022). Adapun realisasi investasi yang tinggi disebabkan oleh sejumlah indikator dari EoDB yang meningkat. Dengan meningkatnya setiap indikator di dalam indeks EoDB akan memberikan iklim investasi lebih baik dan menarik bagi para investor. Sehingga dalam hal ini Variabel Laten EoDB secara langsung memiliki pengaruh langsung terhadap minat investasi.



Gambar 2. Model Keterkaitan EoDB dan Minat Investasi  
Sumber: Penulis (diolah)

Pada Gambar 2 telah dijelaskan bagaimana hubungan dalam model keterkaitan antara EoDB terhadap minat investasi. Dalam menghitung pengaruh dari variabel laten EoDB terhadap minat investasi digunakan pengujian dengan statistik *t* dalam menganalisis dan menguji parameter. Indikator yang menjelaskan variabel laten pada masing-masing digunakan hubungan secara reflektif. Pada penelitian pengaruh

Indikator EoDB terhadap *Socio-Economic Wealth* dengan menggunakan indikator GDP dan HDI, dapat dibuktikan secara empiris bahwa EoDB berpengaruh secara signifikan terhadap *Socio-Economic Wealth* (Rodríguez & Sanchís, 2019). Investasi yang merupakan instrument dalam menentukan pembangunan ekonomi, ditentukan oleh EoDB yang merupakan variabel institusional dari suatu daerah (Saini, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

Analisis awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dari responden yang dijadikan sampel penelitian. Dari sebanyak 150 sampel yang di ambil di sejumlah wilayah di Provinsi DKI Jakarta, dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki usia di atas 40 tahun dengan tingkat pendidikan sarjana sebesar 73%. Selain itu, sampel dalam penelitian ini hampir merata di setiap sektor perekonomian di Provinsi DKI Jakarta. Dominasi sektor di Provinsi DKI Jakarta adalah sektor jasa dengan keterwakilan sampel pada sektor jasa sebesar 28%.

Selain itu pada sampel yang direkap, sektor mayoritas terdapat pada sektor Perdagangan dan Reparasi sebesar 13% dan sektor Property sebesar 8%. Namun uniknya dalam penelitian ini, sampel yang diambil mayoritas sebesar 75% adalah jenis investasi dalam negeri. Dalam 150 sampel yang dilakukan setelah dilakukan analisis deskriptif, akan dilakukan analisis inferensial pada model persamaan struktural.

Tabel 1. Analisis Deskriptif Sampel Penelitian

Variabel	Qty	Rasio
<b>Gender</b>		
Laki-Laki	70	47%
Perempuan	80	53%
<b>Usia Responden</b>		
< =30 th	42	28%
31-35 th	17	11%
36-40 th	28	19%
41-50 th	38	25%
> 50 th	25	17%
<b>Tingkat Pendidikan</b>		
S1	109	73%
S2	11	7%
Lainnya	30	20%

<b>Jenis Usaha dalam Sektor</b>		
Jasa	42	28%
Property	12	8%
Komoditas	1	1%
Barang	8	5%
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	5	3%
Pertambangan	5	3%
Perdagangan dan Reparasi	20	13%
Industri Kimia Dan Farmasi	6	4%
Hotel dan Restoran	6	4%
Industri Makanan	8	5%
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	2	1%
Lainnya	35	23%
<b>Jenis Investasi</b>		
Investasi Asing	38	25%
Investasi Dalam Negeri	112	75%

Sumber: Penulis (diolah)

#### Outer Model (Model Pengukuran)

Output dalam hasil analisis yang didapat dalam penelitian ini berasal dari hasil analisis data yang didapatkan dari survey yang berfokus pada variabel EoDB, faktor ekonomi, dan minat investasi. Masing-masing variabel diukur berdasarkan indikatornya dan setelah itu dilakukan analisis kuantitatif dengan model persamaan simultan yaitu PLS-

SEM yang diolah dengan aplikasi Smart PLS. Dalam model penelitian ini terdapat dua model pengukuran yang digunakan yakni uji validitas dan uji reliabilitas. *Convergent Validity* dapat dianggap cukup apabila nilai dari *Outer Loading* diatas 0,6 dan nilai *Average Variance Extract (AVE)* yang minimal nilainya sebesar 0,5.

Tabel 2. Uji Convergen Validity

Variabel Laten	AVE	Indikator	Keterangan	Outer Loading	Keterangan
Kemudahan Melakukan Usaha (X1)	0.523	<i>Starting a Business</i>	X11	0.709	Valid
		<i>Dealing with Construction Permit</i>	X12	0.680	Valid
		<i>Getting Electricity</i>	X13	0.806	Valid
		<i>Registering Property</i>	X14	0.725	Valid
		<i>Getting Credit</i>	X15	0.728	Valid
		<i>Protecting Minority Investor</i>	X16	0.743	Valid
		<i>Paying Taxes</i>	X17	0.709	Valid
		<i>Trading Across Border</i>	X18	0.762	Valid
		<i>Enforcing Contracts</i>	X19	0.690	Valid
		<i>Resolving Insolvency</i>	X110	0.674	Valid
Faktor Ekonomi (X3)	0.628	Penduduk Angkatan Kerja	X31	0.782	Valid
		Upah Nominal Perusahaan	X32	0.716	Valid
		Teknologi di Provinsi DKI Jakarta	X33	0.785	Valid
		Tersedianya Sumber Daya Alam	X34	0.810	Valid

		Tersedianya SDM Melimpah	X35	0.873	Valid
		Skil Calon Pekerja	X36	0.784	Valid
Minat Investasi	0.788	Minat Investasi Lebih Banyak Saat Ini	Y11	0.918	Valid
(Y)		Keinginan Melanjutkan Investasi di Masa Depan	Y12	0.857	Valid

Sumber: Penulis (diolah)

Pada Tabel 2. pengujian convergent validity, dapat disimpulkan bahwa indikator dari variabel Kemudahan Melakukan Usaha (X1), Faktor Ekonomi (X3), dan Minat Investasi (Y) memperoleh nilai di atas 0,6 dan memiliki nilai AVE lebih dari 0,5. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa indikator dari masing-masing variabel laten dikatakan memenuhi asumsi validitas variabel. Dalam penelitian ini digunakan batasan Outer Loading di atas 0,6 dan AVE di atas 0,5 (Ghozali, 2014).

Tabel 3. Construct Reliability and Validity

Variabel Latent	Composite Reliability	Cronbach's Alpha	Keterangan
Faktor Ekonomi	0.910	0.881	Reliabel
Kemudahan Melakukan Usaha	0.916	0.898	Reliabel
Minat Investasi	0.882	0.736	Reliabel

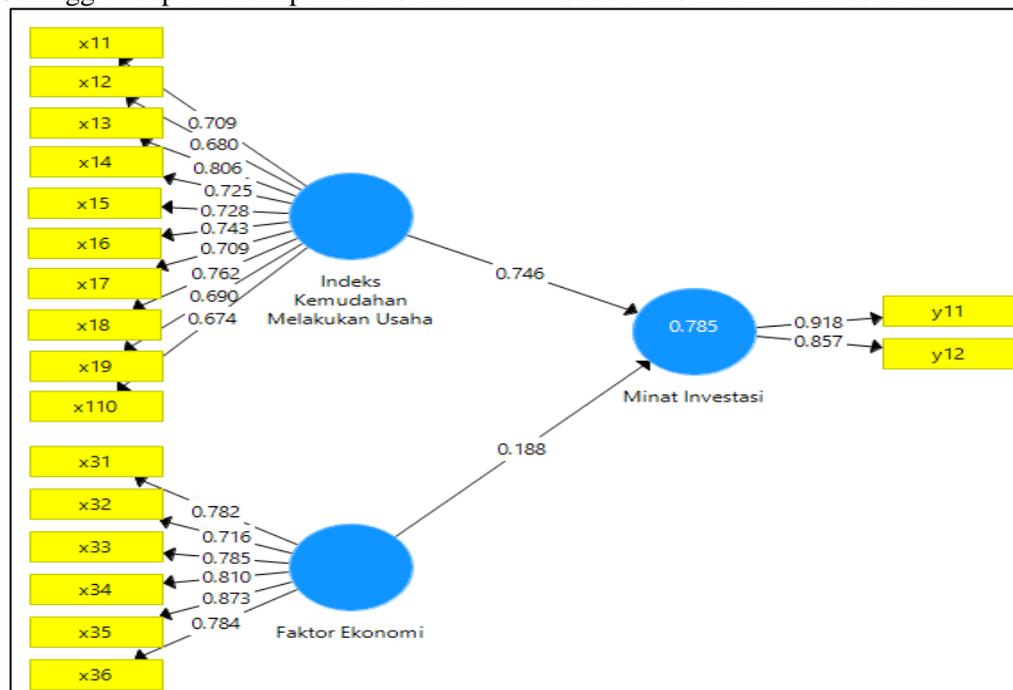
Sumber: Penulis (diolah)

Begitu juga dengan nilai Composite Reability pada output yang diberikan pada Tabel 3. merupakan indikator yang mengukur variabel mempunyai nilai reliabel dengan standar nilainya lebih dari 0,7 dan Cronbach's Alpha menggambarkan nilai reliabilitas semua indikator dengan standar nilainya lebih dari 0,7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

Kemudahan Melakukan Usaha (X1), Faktor Ekonomi (X3), dan Minat Investasi (Y) memiliki reliabilitas yang baik sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

**Inner Model (Model Structural)**

Inner model dalam PLS-SEM digunakan untuk mengetahui dan memprediksi hubungan sebab akibat antar variabel laten.



Gambar 3. Model Struktural Indikator Kemudahan Melakukan Usaha dan Minat Investasi  
Sumber: Penulis (diolah)

Pada Gambar 1. hasil analisis dalam penelitian terlihat bahwa Variabel Kemudahan Melakukan Usaha memberikan pengaruh positif terhadap minat investasi para pelaku usaha menengah besar di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu faktor ekonomi memiliki pengaruh yang positif terhadap minat investasi. Hal ini terlihat dari angka *Inner Model* yang memiliki koefisien dari inner model bernilai positif. Selain inner model yang dihasilkan, perlu pula untuk melihat bagaimana model dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Hal itu tercermindi R Square dan R Square Adjusted. R Square pada dasarnya adalah pengukuran bagaimana sejumlah variabel bebas yang digunakan dapat menggambarkan ataupun menjelaskan keterkaitannya dengan variabel tidak bebas. Adapun nilai yang diberikan dari R Square dan R Square Adjusted adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Nilai R Square Model Penelitian

Variabel Dependen	R Square	R Square Adjusted
Minat Investasi	0.785	0.782

Sumber: Penulis (diolah)

Nilai dari *R Squared Adjusted* bernilai 0,782 memberikan makna bahwa variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini memberikan penjelasan terhadap minat investasi sebagai variabel terikat dan menjelaskan sebesar 78,2% dengan mengasumsikan ceteris paribus. Dengan kata lain bahwa semua konstruk eksogen secara serentak mempengaruhi Y (minat investasi) sebesar 78,2%. Sedangkan sisanya sebesar 22% dijelaskan oleh variabel dan indikator lain yang tidak disebutkan dalam model penelitian ini.

Tabel 5. Nilai Koefisien Path Penelitian

Model	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
Kemudahan Melakukan Usaha → Minat Investasi	0.746	0.750	0.051	14.688	0.000
Faktor Ekonomi → Minat Investasi	0.188	0.187	0.062	3.030	0.003

Sumber: Penulis (diolah)

Dalam Tabel 5. di atas dapat dijelaskan dan dibuktikan bahwa secara simultan Indeks Kemudahan Melakukan Usaha memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Minat Investasi dengan  $\alpha = 5\%$ . Dengan meningkatnya kemudahan melakukan usaha sebesar 1 (satu) satuan, maka akan berpeluang akan meningkatkan minat investasi sebesar 74,6%. Variabel lain yang memberikan pengaruh positif signifikan terhadap minat investasi adalah Faktor Ekonomi dengan  $\alpha =$

5%. Dengan demikian dapat dapat dibuktikan secara empiris bahwa masih terdapat pengaruh Indeks Kemudahan Melakukan Usaha terhadap minat investasi di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya akan dilakukan penelusuran mengenai indikator yang memberikan pengaruh paling besar terhadap masing-masing variabel Indeks Kemudahan Melakukan Usaha (X1) dan Faktor Ekonomi (X3).

Tabel 6. Nilai Koefisien Path Penelitian dari Indikator

Variabel Latent	Indikator	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
Kemudahan Melakukan Usaha	x11	0.132	0.131	0.012	10.640	0.000
	x12	0.128	0.127	0.013	9.509	0.000
	x13	0.154	0.154	0.014	11.141	0.000
	x14	0.136	0.135	0.013	10.869	0.000

	x15	0.141	0.140	0.018	7.874	0.000
	x16	0.138	0.139	0.017	7.910	0.000
	x17	0.136	0.136	0.014	10.013	0.000
	x18	0.155	0.154	0.015	10.269	0.000
	x19	0.136	0.135	0.014	9.615	0.000
	x110	0.123	0.123	0.015	8.395	0.000
Faktor	x31	0.215	0.215	0.022	9.816	0.000
Ekonomi	x32	0.168	0.169	0.021	7.839	0.000
	x33	0.211	0.210	0.017	12.493	0.000
	x34	0.231	0.231	0.016	14.281	0.000
	x35	0.236	0.235	0.016	14.500	0.000
	x36	0.197	0.195	0.020	10.073	0.000
Minat	y11	0.633	0.632	0.030	20.850	0.000
Investasi	y12	0.489	0.490	0.018	26.633	0.000

Sumber: Penulis (diolah)

Pada Tabel 6. tertuang hasil empiris bagaimana indikator dari masing-masing variabel laten secara signifikan dapat dijelaskan besar pengaruhnya dan bagaimana hubungannya. Pada variabel Kemudahan Melakukan Usaha (X1), seluruh indikator secara signifikan dapat menjelaskan Indikator Kemudahan Melakukan usaha. Lima indikator yang menjelaskan Variabel Kemudahan Melakukan Usaha terbesar dan koefisiennya diantaranya adalah *Getting Electricity* (0.806), *Trading Across Border* (0.761), *Protecting Minority Investor* (0.743), *Getting Credit* (0.728), dan *Registering Property* (0.724). Lima indikator tersebut memberikan bobot tertinggi dibandingkan dengan indikator lainnya secara signifikan. Selain variabel Indikator Kemudahan Melakukan usaha, faktor lain yang menjadi pendorong minat investasi adalah Faktor Ekonomi. Indikator yang paling menjelaskan Faktor Ekonomi dari hasil pengujian sampel penelitian secara empiris adalah SDM (0.873) di Provinsi DKI Jakarta yang tersedia cukup banyak dengan jenjang pendidikan yang dibutuhkan, ketersediaan SDA dan kebutuhan pokok lainnya yang berpusat di Provinsi DKI Jakarta, serta jumlah penduduk dengan usia angkatan kerja yang cukup menjanjikan di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini didukung dalam penelitian serupa yang mengangkat bahwa faktor ekonomi paling dominan dalam meningkatkan investasi adalah jumlah angkatan kerja (Rahayu et al., 2019). Hal ini didorong bahwa Provinsi DKI Jakarta masih menjadi sentral perkembangan bisnis dan

pemerintahan, sehingga hal tersebut tidak menutup kemungkinan dapat memberikan peluang pekerjaan yang lebih besar bagi masyarakat yang produktif.

## SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini membuktikan bahwa secara pengujian empiris pada model simultan, Indikator Kemudahan Melakukan Usaha di Provinsi DKI Jakarta memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat investasi di Provinsi DKI Jakarta selain Faktor Ekonomi yang digunakan dalam model persamaan simultan. Peningkatan satu satuan indikator kemudahan melakukan usaha akan berpotensi meningkatkan minat investasi sebesar 74,6% di Provinsi DKI Jakarta, ceteris paribus.

Dalam penelitian ini dijelaskan beberapa indikator yang perlu untuk diperhatikan untuk dapat menarik minat investasi di Provinsi DKI Jakarta untuk dapat memberikan kepastian investasi bagi pelaku bisnis. Berdasarkan hasil pengujian empiris yang dilakukan, beberapa indikator tersebut adalah *Getting Electricity* (0.806), *Trading Across Border* (0.761), *Protecting Minority Investor* (0.743), *Getting Credit* (0.728), dan *Registering Property* (0.724).

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua civitas akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri, rekan kerja di

Fakultas Politik Pemerintahan, teman, dan keluarga yang telah memberikan kritik, saran, dan dukungan untuk proyek ini. Penelitian ini dibuat untuk mendukung Pemda khususnya Provinsi DKI Jakarta untuk dapat menjadikan masyarakatnya sejahtera dengan investasi yang dapat diatur dengan baik melalui kebijakan pemerintah. Penulis juga mengatakan bahwa penelitian ini dibuat dari sudut pandang dan pengalaman penulis sebagai staf Tenaga Ahli di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, penulis minta maaf jika penelitian ini perlu disempurnakan dari berbagai latar belakang dan sudut pandang untuk mencapai topik yang telah mereka selesaikan. Penulis berharap artikel ini akan membantu dunia penelitian dan orang-orang yang membacanya khususnya di kalangan pemerintah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abille, A. B., & Mumuni, S. (2023). Tax incentives , ease of doing business and inflows of FDI in Africa: Does governance matter? Tax incentives , ease of doing business and inflows of FDI in Africa: Does governance matter? *Cogent Economics & Finance*, 11(1).  
<https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2164555>
- Akbar, M., & Yazid, F. (2021). Kepastian Hukum Dalam Kemudahan Berusaha Di Era Revolusi Industri 4 . 0 Terkait Dengan Profesi Notaris. *Jurnal Ilmiah Penelitian LAW\_JURNAL*, 1(2), 116–124.
- Alwajidi, M. F. (2020). Urgensi Pengaturan Cyber Notary dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(2), 257–274.
- Christmawan, P. E. E., & Utami, L. R. (2022). Strategi Kemudahan Berusaha dalam Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Indonesia di Bidang Ekspor dan Investasi. *Jurnal Manajemen Dewantara*, 6(1), 118–131.  
<http://jurnal.ustjogja.ac.id>
- Erni, E., & Jaya, F. (2022). Efektifitas Peerizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha. *Jurnal Wajah Hukum*, 6(2), 248–257.  
<https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.927>
- Femina, M., Patil, A., Joseph, M. J., & Mary, J. (2022). Impact of Ease of Doing Business on FDI Inflows Across Different Economies. *YMER*, 21(5), 194–216.
- Gumala, F., & Anis, A. (2019). Pengaruh Korupsi, Kualitas Pembangunan Manusia, dan Penanaman Modal Asing (FDI) terhadap Kemiskinan di ASEAN. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(2), 541–552.
- Haliti, B., Merovci, S., & Hetemi, A. (2019). The Impact of the Ease Doing Business Indicators on Foreign Direct Investment in the European Transition Economies. *Ekonomika*, 98(2), 19–32.
- Hamzah, R., Baihaqi, M. A., & Kurniasih, E. (2023). Sosialisasi Hukum Terkait Perseroan Perorangan Dalam Mewujudkan Kemudahan Berusaha Bagi Masyarakat Di Kepenghuluan Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *ARSY: Aplikasi Riset Kepada Masyarakat*, 3(2), 190–194.  
<http://journal.al-matani.com/index.php/arsy>
- Hasan, M., Rahman, M. N., & Iqbal, B. A. (2018). Corruption and FDI Inflows : Evidence from India and China. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 8(4), 173–182.  
<https://doi.org/10.2478/mjss-2018-0088>
- Herlith, H. (2016). Perkembangan Liberalisasi Investasi dari Asean Framework Agreement on Services (AFAS) Paket 1 Sampai Paket 8 dan Masuknya Foreign Direct Investment (FDI) Asal ASEAN pada Jasa Transportasi Udara Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.21009/JPEB.004.2.3>
- Ikeanyibe, O., Ugwu, C. E., Ugwuibe, O. C., & Obioji, J. N. (2021). Inter-Agency Delivery System : The Agility of Public Sector Organizations and Ease of Doing Business in Nigeria. *International Journal of Public Administration in the Digital Age*, 8(1), 32–45.  
<https://doi.org/10.4018/IJPADA.20210101.oa3>

- Indrajit, A., Loenen, B. Van, Eresta, V., Ploeger, H., Lemmen, C., & Oosterom, P. Van. (2021). Land Use Policy Implementation of the spatial plan information package for improving ease of doing business in Indonesian cities. *Land Use Policy*, 105, 105338. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105338>
- Kennedy, P. S. J. (2017). Hubungan Persepsi Potensi Korupsi, Daya Saing dan Kemudahan Berusaha Serta Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Analisa Data dari Survei Persepsi Korupsi). *IKRAITH-HUMANIORA*, 1(2).
- Martua, A. (2022). Dampak Investasi Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (Sunter dan Bantargebang) terhadap Perekonomian Provinsi DKI Jakarta. *MONAS Jurnal Inovasi Aparatur*, 4(2), 419–431. <https://doi.org/https://doi.org/10.54849/monas.v4i2.103>
- Mustika, N., Sugiharti, D. K., & Trisnamansyah, P. (2020). Pengenaan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan yang Diikat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dihubungkan dengan Ease of Doing Business (EODB) dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2, 172–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.231>
- Nageri, K. I. (2020). Ease of Doing Business and Capital Market Development in a Demand Following Hypothesis : Evidence from Ecowas. *Studia Universitatis Economics Series*, 30(4), 24–54. <https://doi.org/10.2478/sues-2020-0023>
- Raghdsifa, H., Aimon, H., & Triani, M. (2018). Kausalitas Infrastruktur Transportasi, Foreign Direct Investment (FDI) dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ecogen*, 1(3), 659–672.
- Rahayu, R., Desvina, A. P., & Yendra, R. (2019). Model Persamaan Simultan Pada Analisis Hubungan Gross Domestic Product (GDP) dan Foreign Direct Investment (FDI) di Asean. *Seminar Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi, Dan Industri*, 11(November), 482–485.
- Rodríguez, A. L. L.-, & Sanchís, C. (2019). Could the Ease of Doing Business be considered a predictor of countries ' Socio-Economic Wealth ? An empirical analysis using PLS-SEM. *Journal of International Studies*, 12, 229–243. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2019/12-4/15>
- Saini, M. (2021). Comparative Impact of Logistics Performance Index , Ease of Doing Business and Logistics Cost on Economic Development : A Fuzzy QCA Analysis. *Journal of Business Economics and Management*, 22(6), 1577–1592.
- Setiadi, W. (2018). Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha. *Jurnal Rechtsvinding*, 7(3), 321–334.
- Sinaga, E. J. (2017). Upaya Pemerintah dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 6(3), 329–348.
- Wang, J., Chou, T. P., Chen, C., & Bu, X. (2020). Leaders Future Orientation and Public Health Investment Intention : A Moderated Mediation Model of Self-Efficacy and Perceived Social Support. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 1–15. <https://doi.org/10.3390/ijerph17186922>
- Wijaya, R. E. (2018). Dukungan IFRS pada FDI dalam Peningkatan Kemakmuran Negara. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 3(2), 87–97. [doi.org/10.18382/jraam.v3i2.87](https://doi.org/10.18382/jraam.v3i2.87)
- Winata, M. R., Putri, M. C., & Aditya, F. (2018). Legal Historis Kewenangan Pengujian dan Pembatalan Peraturan Daerah Serta Implifikasinya Terhadap Kemudahan Berusaha. *Jurnal Rechtsvinding*, 7(3), 335–352.